

PROJECT CITIZEN, SEBUAH UPAYA MENJADIKAN PENGAJARAN PPKN DI KOTA DEPOK MENJADI LEBIH EFEKTIF DAN ATRAKTIF

Wahidah R. Bulan

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Email: wr.bulan@upnvj.ac.id

ABSTRACT

There are a number of challenges and limitations faced by Pancasila and Citizenship Education (PPKn) teachers in Depok City in teaching Civics subjects and specifically in instilling nationalism (nationalism literacy) in students. The challenge in question is the low interest of students to study and explore Civics learning materials, while the limitations faced are the ability to teach Civics learning materials better so as to produce maximum learning outcomes. Another limitation is that Civics is a multi-dimensional character education subject, which requires special competence in teaching. These problems need to be overcome considering that Civics subjects are a means to increase student nationalism (civic and cultural literacy) which is one of the basic skills of 21st century human resources besides that the degradation of nationalism can have an impact on the fading of Indonesian cultural values. The solution provided is to provide training to PPKn Depok City teachers regarding Project Citizen (learning activities to become citizens), namely a learning project intended to encourage students to be motivated to explore issues in the school or community and to be actively involved in monitoring and influencing public policies that are implemented jointly with other students in the classroom and in extracurricular groups. Project Citizen was chosen because it has proven to be successful in increasing student interest in participating in Civics learning activities in several schools that have practiced it, although it requires a number of adjustments or modifications to be implemented. Through the transfer of knowledge and skills regarding Project Citizen and several other supporting materials, it is hoped that partner problems can be overcome, so that the hope that Civics teaching can take place more effectively and attractively can be realized.

Keywords: *effective, attractive, project citizen, Civics, nationalism literacy (civic and cultural literacy).*

ABSTRAK

Terdapat sejumlah tantangan dan keterbatasan yang dihadapi para guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di Kota Depok dalam mengajarkan mata pelajaran PPKn dan secara khusus dalam menanamkan nasionalisme (literasi nasionalisme) kepada siswa didik. Tantangan dimaksud adalah rendahnya minat siswa untuk mempelajari dan mendalami materi pembelajaran PPKn, sedangkan keterbatasan yang dihadapi adalah kemampuan mengajarkan materi pembelajaran PPKn secara lebih baik sehingga menghasilkan capaian pembelajaran yang maksimal. Keterbatasan lainnya mengingat mata pelajaran PPKn merupakan mata pelajaran pendidikan karakter yang bersifat multi-dimensioanal, yang membutuhkan kompetensi khusus dalam pengajarannya. Permasalahan tersebut perlu diatasi mengingat mata pelajaran PPKn merupakan sarana untuk meningkatkan nasionalisme siswa (*civic and cultural literacy*) yang merupakan salah satu kecakapan dasar SDM abad 21 selain bahwa degradasi nasionalisme dapat memberi dampak pada lunturnya nilai-nilai budaya Indonesia. Solusi yang diberikan adalah dengan memberikan pelatihan kepada para guru PPKn Kota Depok mengenai *Project Citizen* (kegiatan belajar menjadi warga negara), yaitu proyek pembelajaran yang dimaksudkan untuk mendorong siswa agar termotivasi mendalami isu-isu yang terdapat di sekolah atau masyarakat serta mau terlibat aktif dalam memantau dan mempengaruhi kebijakan publik yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan siswa lain di dalam kelas maupun dalam kelompok ekstrakurikuler. *Project Citizen* dijadikan pilihan karena terbukti berhasil meningkatkan minat siswa mengikuti kegiatan pembelajaran PPKn di beberapa sekolah yang pernah mempraktekkan, meski memerlukan sejumlah penyesuaian atau modifikasi agar dapat dilaksanakan. Melalui *transfer knowledge* dan *skill* mengenai *Project Citizen* dan beberapa materi pendukung lainnya persoalan mitra diharapkan dapat diatasi, sehingga harapan agar pengajaran PPKn dapat berlangsung lebih efektif dan atraktif dapat diwujudkan.

Keyword: *efektif, atraktif, project citizen, PPKn, literasi nasionalisme (civic and cultural literacy).*

1. PENDAHULUAN

Nasionalisme merupakan hal penting yang perlu dipastikan ada pada diri generasi muda (termasuk pelajar), mengingat keberadaan mereka sebagai penentu masa depan bangsa. Semakin jauhnya rentang waktu awal kemerdekaan yang kini telah memasuki usia 76 tahun, menjadikan hal tersebut tidak mudah. Ditemukannya berbagai kasus yang mengindikasikan rendahnya nasionalisme siswa seperti siswa tidak hafal Pancasila dan lagu-lagu kebangsaan bahkan lagu Indonesia Raya, menjadi bukti nyata bahwa ada yang masalah dengan nasionalisme pelajar kita. (<https://www.redaksi24.com/duh-banyak-siswa-smkn-di-kabupaten-tangerang-tak-hafal-lagu-kebangsaan/>, <https://hits.suara.com/read/2021/03/24/133829/miris-bocah-tak-hafal-lagu-indonesia-raya-publik-lagu-tiktok-pasti-hafal?page=all>). Rendahnya disiplin siswa mengikuti upacara bendera, sering terlibat tawuran, dan bersikap tidak toleransi terhadap teman yang berbeda agama dan budaya (Oki Wardoyo dan Aisiah, 2021; Bulan, 2019), contoh lain yang juga banyak ditemukan.

Relevan dengan hal tersebut, Yudrik Jahja (2011: 230) mengatakan bahwa generasi muda sekarang kurang memiliki rasa cinta tanah air yang dapat dilihat dari lebih gemarnya anak muda untuk pergi ke bioskop daripada ke museum-museum sejarah perjuangan bangsa. Hal itu menurutnya dapat terjadi karena beberapa sebab, yaitu kurangnya pemupukan rasa cinta tanah air semenjak kecil, sinetron-sinetron yang ditayangkan di televisi merupakan tayangan yang kurang produktif bagi perkembangan anak, selain karena hal-hal yang terkait dengan bangsa ini tidak dapat menimbulkan rasa cinta tanah air.

Pengajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) diharap mampu menanamkan nasionalisme pelajar dengan baik dan mencegah bahkan mengatasi berbagai persoalan tersebut di atas. Didalam Pasal 37 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan penjelasannya disebutkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Secara lebih detail tujuan dari Pendidikan Pancasila bertujuan untuk menghasilkan peserta didik yang berperilaku, (1) memiliki kemampuan untuk mengambil sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya, (2) memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya, (3) mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta memiliki kemampuan untuk memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia. Bukan hanya itu, melalui Pendidikan Pancasila, warga negara Republik Indonesia diharapkan mampu memahami, menganalisis dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat bangsanya secara berkesinambungan dan konsisten berdasarkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia (Kaelan, 2016: 6-7).

Dalam pelaksanaannya hal tersebut tidak selalu dapat diwujudkan. Diantaranya karena sejumlah tantangan dan keterbatasan yang dialami para pengajar PPKn. Mengenai tantangan yang dihadapi, diantaranya karena rendahnya minat siswa untuk mempelajari PPKn dan secara khusus untuk mendalami sejarah dan budaya bangsa. Selain akibat guru kurang persiapan dalam merencanakan pembelajaran dan kurang menguasai materi pembelajaran sehingga tidak mampu menarik minat siswa, yang tidak dapat dipungkiri juga terjadi sebagai dampak negatif masifnya penetrasi budaya luar (barat terutama Korea Selatan) kepada pelajar terutama melalui media digital. Akibatnya kegandrungan mereka pada budaya luar cenderung sangat tinggi bahkan berlebihan. Sebagaimana dilansir Twitter (2019), Indonesia menjadi rumah bagi jutaan K-popers atau pecinta K-pop dan menjadi negara dengan peringkat ketiga paling banyak mentweet artis K-Pop. Indonesia bahkan menjadi negara dengan posisi ke-2 (9,9%) dalam menyaksikan video-video K-pop di Youtube, sedikit saja di bawah Korea Selatan (Won So, 2020). (<https://egsa.geo.ugm.ac.id/2020/09/30/fenomena-korean-wave-di-indonesia/>) Dikemasnya informasi mengenai budaya luar tersebut secara baik mampu meningkatkan minat pelajar untuk

menyaksikan bahkan menyebabkan mereka tidak bisa lepas darinya. (<https://tekno.tempo.co/read/491864/4-alasan-remaja-gemar-media-sosial/full&view=ok> dan <https://tekno.tempo.co/read/483101/mengapa-internet-bikin-kecanduan>).

Hal yang lebih mengkhawatirkan, kegandrungan tersebut tidak sebatas mengikuti *trendsetter* dalam dunia musik, seni akting, fashion, dsb; akan tetapi juga mengikuti gaya hidup aktris-aktris tersebut (Khairunnisa Galih, 2013). Meski pada awalnya kegandrungan para remaja penyuka aktris Korea hanya mewujud dalam bentuk kehadiran berbagai komunitas Korea dikalangan pelajar, pada tahap lanjut muncul dalam bentuk yang lebih serius yaitu upaya imitasi identitas diri dengan artis Korea dalam kehidupan sehari-hari, seperti penampilan (gaya rambut, gaya berpakaian, dan menggunakan make-up), penggunaan bahasa Korea, hingga penggunaan produk Korea.

Mengenai keterbatasan yang dihadapi para guru dalam mengajar PPKn, diantaranya terkait dengan kemampuan guru PPKn menyampaikan materi pembelajaran secara efektif dan atraktif. Rendahnya antusiasme siswa pada saat belajar PPKn yang ditemukan dalam banyak studi mengindikasikan hal tersebut seperti siswa kurang memperhatikan guru saat menerima pelajaran, kurang fokus, enggan berfikir, merasa malu dan bosan (Bulan, 2019; Pranata, 2018; Kusumaningsari, 2017). Hal lain, mengingat mata pelajaran PPKn merupakan mata pelajaran pendidikan karakter yang bersifat multidimensioanal dan mensyaratkan kemampuan tertentu dalam pelaksanaannya (Cogan and Derricott: 1998). Mengingat dalam praktek kompetensi tersebut tidak selalu dimiliki para guru PPKn, mengakibatkan kegiatan pembelajaran PPKn berlangsung dengan metode pembelajaran yang kurang mendukung. Akibatnya, hasil pembelajaran yang maksimal berupa terbentuknya karakter pelajar yang memiliki nasionalisme yang baik, sulit dicapai. Hal lain yang tidak dapat diabaikan, kondisi pandemi saat ini yang mengharuskan kegiatan belajar berlangsung secara daring, ikut memperparah keadaan mengingat untuk dapat mengajar secara daring diperlukan kompetensi tertentu. Terlebih mengajar daring kepada para pelajar yang merupakan generasi Z, yaitu generasi yang sudah terpapar media digital sejak lahir.

Persoalan-persoalan itulah yang dihadapi para guru PPKn di Kota Depok yang terhimpun di dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PPKn Kota Depok (mitra kegiatan kegiatan pengabdian masyarakat ini) dalam menanamkan nasionalisme kepada para pelajar yang menjadi siswa didik mereka, berdasarkan kegiatan *need assessment* yang dilakukan. Permasalahan tersebut perlu diatasi mengingat mata pelajaran PPKn merupakan sarana untuk meningkatkan nasionalisme siswa (*civic and cultural literacy*/literasi kewargaan dan budaya atau yang dapat disingkat menjadi literasi nasionalisme), yang merupakan salah satu kecakapan dasar SDM abad 21 selain literasi aksara (baca tulis), literasi numerasi, literasi sains, literasi keuangan, dan literasi digital. Hal lain bahwa degradasi nasionalisme juga memberi dampak pada lunturnya nilai-nilai budaya Indonesia, yang dalam jangka panjang dapat mengganggu keberlanjutan pembangunan Indonesia sebagai sebuah bangsa dengan aneka kekhasannya.

Karena itu sebagai solusi ditetapkan memberikan kegiatan pelatihan guna memenuhi kebutuhan mereka, baik berupa transfer pengetahuan (*knowledge transfer*) maupun transfer ketrampilan (*skill transfer*). Harapannya kemampuan para guru PPKn di Kota Depok dalam mengajarkan PPKn dapat ditingkatkan dan pada tahap berikutnya diharapkan akan berdampak positif pada peningkatan nasionalisme para pelajar.

Sebenarnya terdapat kegiatan pembekalan untuk meningkatkan kompetensi guru-guru PPKn di Kota Depok yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Jawa Barat Kemendikbud Ristek. Diselenggarakan dua kali setahun, namun hanya dapat diikuti tidak lebih dari 10 orang saja sebagai utusan dari Kota Depok, yaitu tim Pengembangan Kurikulum (TPK) dan Ketua MGMP PPKn Kota Depok, sementara jumlah guru PPKn di Kota Depok mencapai ratusan orang. Transfer

materi pelatihan dari mereka yang sudah mendapatkan pelatihan kepada mereka yang tidak mendapat pelatihan, tidak terjadi karena tidak ada penugasan khusus dari pihak Kemendikbudristek. Dengan asumsi bahwa para guru sudah mendapat dana sertifikasi, mereka yang tidak mendapat pelatihan diasumsikan dapat melakukan pembelajaran secara mandiri untuk peningkatan kapasitas mereka. Akan tetapi dalam praktik hal tersebut tidak selalu terjadi. Perhatian dari pihak sekolah pun menurut penuturan pihak MGMP PPKn Kota Depok relatif minim, karena kebanyakan sekolah lebih berkonsentrasi pada penguatan mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Negara seperti Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris (sebelum UN ditiadakan pelaksanaannya). Karena hal itu tidak sedikit guru-guru PPKn yang “terpaksa” mengajar dengan berbagai keterbatasan yang ada, yang menyebabkan tidak maksimalnya capaian pembelajaran mata pelajaran PPKn, termasuk dalam menanamkan nasionalisme siswa. Transfer informasi mungkin sebagian dapat dilakukan, namun tidak dengan transfer spirit perjuangan bangsa yang pada tahap berikutnya dapat berbuah pada tumbuhnya kecintaan akan Indonesia dan kebanggaan sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

Sumber keterbatasan tersebut berdasarkan diskusi dengan pihak MGMP Kota Depok, yang pertama karena ketidakmampuan para guru PPKn mengkontekstualisasikan materi pembelajaran dengan situasi dan kondisi kekinian akibat terlalu *teksbooks* dan lebih berorientasi pada penyelesaian kurikulum. Terkait kondisi kekinian misalnya, tidak sedikit guru-guru PPKn di Kota Depok yang tidak mengikuti perkembangan peristiwa-peristiwa yang terjadi atau isu-isu yang hangat diperbincangkan karena tidak ada ruang dimana diskusi mengenai hal tersebut dapat dilakukan. Kegiatan rutin MGMP PPKn Kota Depok misalnya, lebih banyak untuk membahas penuntasan kurikulum sementara kegiatan pembahasan hal-hal diluar kurikulum dapat dikatakan tidak pernah terjadi.

Persoalan kedua, karena kurang mampunya guru PPKn merespon kekeliruan pemahaman siswa yang kadang terdengar *absurd*. Kekeliruan tersebut diantaranya akibat siswa terpapar informasi dari media sosial yang tak sedikit memuat *hoax*, selain memuat pemikiran menyimpang atau tidak sesuai dengan nilai-nilai ke-Indonesian. Berdasarkan penuturan mitra, ditemukan sejumlah siswa yang menilai Pancasila sebagai ideologi bangsa sudah usang dan tidak relevan dengan tantangan zaman serta bahwa Pancasila hingga kini belum terbukti mampu menghantarkan Indonesia mencapai kemajuan.

Ketidak-mampuan guru menyampaikan materi dengan berorientasi pada kebutuhan dan kondisi siswa akibat ada kesenjangan generasi, merupakan persoalan lainnya. Hal ini menimbulkan keluhan dari siswa sebagaimana diungkap kepada pengusul dalam kegiatan lain, yaitu FGD dengan sejumlah siswa SLTA di Jakarta Selatan, yang pernah dilakukan. Mereka mengatakan bahwa materi dan cara penyampaian materi pelajaran PPKn tidak mampu menginspirasi siswa dan cenderung membosankan, karena tidak sesuai dengan kebutuhan jaman, metode pengajaran tidak mengikuti perkembangan kekinian siswa didik, dan tidak sedikit yang mengeluhkan bahwa mata pelajaran PPKn tidak mampu memotivasi siswa untuk meningkatkan nasionalisme mereka (Bulan, 2019).

Senada dengan hal tersebut Winataputra (2008) mengatakan bahwa proses pembelajaran di sekolah-sekolah saat ini masih jauh dari sifat mendidik dan mencerdaskan dimana pendekatan pembelajaran yang bersifat ekspositoris dan naratif yang mementingkan penguasaan fakta dan konsep-konsep semakin jarang dilakukan. Kebanyakan peserta didik bahkan seolah dikondisikan hanya untuk belajar sekedar lulus ujian, sehingga materi pembelajaran cenderung menekankan pada penguasaan pengetahuan yang tidak fungsional.

Terkait hal tersebut maka jenis permasalahan yang ingin dibantu penyelesaiannya melalui program Program Kemitraan Masyarakat (PKM) yang diselenggarakan dosen FISIP UPN Veteran Jakarta ini adalah peningkatan kapasitas mitra yaitu para guru PPKn di Kota Depok, sehingga mampu mengajar mata pelajaran PPKn dengan lebih efektif dan atraktif dan yang pada

akhirnya diharapkan dapat mewujudkan capaian pembelajaran dengan lebih maksimal. Adapun peserta pelatihan adalah para guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang berhimpun di dalam Musyawarah Guru PPKn untuk tingkat SLTP yang berlokasi di Kota Depok, dimana berhimpun 223 guru yang berasal dari 180 sekolah. Akan tetapi mengingat keterbatasan yang ada pada pihak pelaksana, kegiatan dibatasi hanya diikuti 40 orang guru SMP di Kota Depok, yang diambil dari sekolah dengan akreditasi B atau lebih rendah. Kegiatan dilaksanakan pada 18-19 September 2021 melalui daring, bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Depok dan Institut Literasi Nasionalisme/ILNAS yang juga berada di Depok.

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Sebagaimana disebutkan bahwa solusi kegiatan PKM ini adalah melakukan kegiatan *upgrading* untuk peningkatan kapasitas (*capacity building*) para guru PPKn Kota Depok. Adapun metode yang dipilih adalah dengan menyelenggarakan kegiatan pelatihan, yang pelaksanaannya dibagi menjadi dua tahapan yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan pelatihan (tahap transfer *knowledge* dan *skill*). Pada tahap persiapan, aktifitas yang dilakukan adalah: (1) Identifikasi permasalahan mitra (*need assesment*) dalam pengajaran PPKn dengan metode wawancara mendalam kepada Ketua MGMP PPKn Kota Depok dan (2) Survey kepada siswa didik mengenai penilaian mereka terhadap kegiatan pembelajaran PPKn guna mendapat informasi awal mengenai kondisi situasional pengajaran PPKn dalam perspektif siswa didik. Sedangkan pada tahap *transfer knowledge* dan *skill* aktifitas yang dilakukan adalah pelaksanaan Workshop Peningkatan Kapasitas Guru-Guru PPKN, yang dilaksanakan dengan menghadirkan para pakar terkait dan didukung oleh keahlian tim pelaksana. Materi Workshop ditetapkan merujuk pada hasil identifikasi permasalahan dan survey yang dilakukan, sedangkan metode pelatihan yang digunakan adalah metode pembelajaran orang dewasa (*andragogi*) agar tercipta kegiatan pelatihan yang lebih mengena (sesuai dengan tujuan).



Gambar 1. Solusi yang Ditawarkan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Apa dan Mengapa Project Citizen ?

Sebagaimana telah disebutkan, pelaksanaan kegiatan abdimas ini dilaksanakan dalam dua tahapan, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan kegiatan pelatihan. Pada tahap persiapan, kegiatan yang dilakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan pendampingan para guru PPKn Kota Depok (*need assesment*), yang dilakukan dengan mewawancarai pihak pengelola MGMP PPKn Kota Depok, dalam hal ini Ketua MGMP PPKn Kota Depok (menjabat sebagai ketua pada saat proses pengajuan proposal kegiatan).

Hasil *assessment* yang diperoleh adalah bahwa para guru PPKn membutuhkan pendampingan untuk peningkatan kompetensi mengajar PPKn agar kegiatan pembelajaran PPKn dapat lebih efektif dan interaktif dan yang pada tahap berikutnya diharapkan dapat meningkatkan capaian pembelajaran PPKn menjadi lebih maksimal. Terakait hal itu, sebagai solusi, ditetapkan untuk memberikan pelatihan mengenai *Project Citizen* sebagai upaya peningkatan kompetensi yang

dibutuhkan tersebut. Dipilihnya *Project Citizen* tentu dengan banyak pertimbangan, yang utama karena pelaksanaan *Project Citizen* sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran PPKn terbukti diberbagai kasus mampu meningkatkan minat siswa terhadap kegiatan pembelajaran PPKn bahkan memberikan sejumlah inspirasi. Hal tersebut sebagaimana penelusuran penulis terhadap praktek pelaksanaan kegiatan *Project Citizen* yang pernah dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian Titik Haryati dan Noor Rochman (2012) bahwa model pembelajaran *Project Citizen* dapat meningkatkan kualitas pembelajaran PPKn di Kelas VIII D SMP Negeri 3 Semarang. Kualitas pembelajaran PPKn yang sebelum penggunaan model pembelajaran *Project Citizen* hanya 52 % (kurang baik), setelah penggunaan model pembelajaran *Project Citizen* meningkat menjadi 81 % (sangat baik). *Project Citizen* menjadikan kegiatan pembelajaran PPKn menjadi lebih bermakna, lebih menarik, dan kualitas pembelajaran menjadi lebih meningkat dalam berbagai aspek. Meski demikian, sebagaimana disarankan peneliti, penerapan model pembelajaran *Project Citizen* hendaknya memperhatikan dan menyesuaikan kondisi, sarana prasarana dan fasilitas yang ada. (<http://rochman-goodcitizen.blogspot.com/2012/06/jurnal-project-citizen.html>).

Studi lain dilakukan oleh Asep Dahliyana dan Cik Suabuana (2019). Asep Dahliyana melakukan kegiatan *Project Citizen* sebagai *project learning* mata kuliah Kewarganegaraan pada mahasiswa yang sedang melakukan kontrak mata kuliah Pendidikan PGSD A dan C serta Program Studi Biologi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Kegiatan yang melibatkan 108 orang mahasiswa tersebut terbukti mampu menguatkan nasionalisme peserta didik. Sedangkan Suabuana (2010) dilakukan sebelumnya, yaitu tentang pengembangan pendidikan nilai bela Negara dalam Pendidikan Kewarganegaraan pada Perguruan Tinggi melalui Model pembelajaran *Project Citizen*. Ia menemukan bahwa secara umum kelas yang menggunakan *Project Citizen* cenderung lebih baik dibanding kelas yang diselenggarakan secara konvensional.

Studi Yosaphat Haris Nusarastraya, dkk (2013) juga menarik ditelisik. Penelitian ini menggunakan eksperimen dengan subjek penelitian mahasiswa UKSW Salatiga, Jawa Tengah ini menemukan bahwa penggunaan *Project Citizen* berpengaruh pada kemampuan berpikir kritis secara signifikan. Ditinjau dari tiga elemen berpikir kritis yaitu sikap positif, kemampuan, dan karakteristik berpikir kritis, *Project Citizen* lebih tepat dan baik untuk mengembangkan karakteristik berpikir kritis. Hal itu karena *Project Citizen* bukan model untuk mengembangkan pemikiran yang berciri spekulatif metafisis, melainkan mengembangkan pemikiran yang bersifat eksistensial-positif dan operasional pragmatik yang menopang cara kerja ilmiah (ilmu pengetahuan) karena mengandalkan argumen, data objektif yang bersifat empiris, dan terukur. Dengan kata lain temuan studi memperkuat konsep belajar mengajar dengan pengertian atau pemahaman bukan sekedar dengan hafalan.

Terakhir, studi mengenai praktek penggunaan *Project Citizen* dalam Pendidikan PPKn yang dilakukan Hafidz Maksum (2011) dengan mengambil lokus di SMA Negeri 12 Banda Aceh. Hasil studi kuantitatif yang dilakukan Maksum menyimpulkan bahwa pembelajaran PPKn dengan Model *Project Citizen* meningkatkan kecakapan kewarganegaraan siswa dengan pengaruh signifikan pada indikator mengidentifikasi masalah meski tidak berpengaruh signifikan terhadap kecakapan partisipatoris (*participatory skills*).

Berbagai hasil penelitian yang menunjukkan bukti empiris keunggulan penggunaan model *Project Citizen* dalam meningkatkan capaian pembelajaran PPKn tersebut senada dengan apa yang dikatakan Budimansyah (2008:183). Menurutnya *Project Citizen* memberi ruang kepada siswa untuk berpartisipasi secara aktif dan kreatif sehingga meningkatkan minat siswa terhadap PPKn, karena *Project Citizen* memberi pengalaman kepada siswa untuk membentuk identitas mereka sendiri dan membina hubungan mereka dengan masyarakat. Siswa yang mulai bergeser pemikirannya dari berfikir konkret menuju berfikir abstrak, ditantang untuk berusaha menggali nilai-nilai yang menurut mereka baik atau buruk dan sah atau tidak sah. Karena itu ia menilai

Project Citizen merupakan salah satu model adaptif yang sangat tepat untuk digunakan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran PPKn. Adapun tujuan pelaksanaan *Project citizen* secara lebih detail adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa: (1) mengidentifikasi pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam berinteraksi dengan pemerintah dan kehidupan masyarakat, (2) melakukan praktek kerja tim, pemecahan masalah, dan partisipasi masyarakat, (3) menganalisis masalah dan menentukan beberapa opsi solusi, dan (4) mendukung keputusan dengan bukti, praktik, dan tindak lanjut.

Selain menjadikan kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik, Budimansyah (2008: 183) mengatakan bahwa melalui *Project Citizen* kompetensi kewarganegaraan pelajar dapat ditingkatkan. Merujuk Branson (Barnson 1998:16 dalam Efi Miftah Faridli, terdapat tiga komponen penting kompetensi kewarganegaraan, yaitu: (1) *Civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), berkaitan dengan apa yang seharusnya diketahui oleh warganegara; (2) *Civic skill* (keterampilan kewarganegaraan), adalah kecakapan intelektual dan partisipatoris warga negara yang relevan; dan (3) *Civic disposition* (watak kewarganegaraan) yang mengisyaratkan pada karakter publik ataupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional. Dalam konteks peningkatan nasionalisme pelajar, kompetensi yang terkait adalah *civic disposition*, yaitu karakter atau watak pelajar nasionalis. Singkatnya dalam *Project Citizen* siswa diajak untuk memecahkan masalah riil dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Siswa belajar menemukan alternatif pemecahan masalah. Disamping itu siswa juga mengembangkan proses penalaran dan klarifikasi nilai serta mengembangkan usulan kebijakan publik dan mengusulkan rencana tindakan.

Project Citizen sendiri adalah model pembelajaran berbasis portofolio. Melalui model ini para siswa bukan hanya diajak untuk memahami konsep dan prinsip keilmuan, tetapi juga mengembangkan kemampuannya untuk bekerja secara kooperatif melalui kegiatan belajar praktik/empirik sehingga kegiatan pembelajaran akan semakin menantang, mengaktifkan, dan lebih bermakna (Hafidz Maksum, 2013). *Project Citizen* merupakan inovasi pembelajaran yang dirancang untuk membantu peserta didik memahami teori kewarganegaraan melalui pengalaman belajar praktik-empirik. Dengan adanya praktik, siswa diberikan 1997atihan untuk belajar secara kontekstual (Depdiknas, 2003: 12). *Project Citizen* selain itu juga merupakan satu *instructional treatment* yang berbasis masalah untuk mengembangkan pengetahuan, kecakapan, dan watak kewarganegaraan demokratis yang memungkinkan dan mendorong keikutsertaan dalam pemerintahan dan masyarakat sipil (Budimansyah, 2009).

Terkait dengan kelebihan dan keunggulan pembelajaran *Project Citizen* secara lebih detail adalah sebagai berikut: (1) memungkinkan siswa terhubung dengan peristiwa dan masalah dunia nyata; (2) memungkinkan siswa mengintegrasikan berbagai konsep dan ide-ide terkait; (3) mendorong siswa dapat menggunakan pengetahuan dan keterampilan dari berbagai disiplin ilmu; (4) mendorong siswa belajar untuk bekerja sama dengan rekan-rekan dalam suatu kelompok; (5) memungkinkan siswa mengevaluasi kemajuan mereka sendiri melalui penilaian diri; (6) memungkinkan siswa berhubungan dengan kegiatan penilaian untuk kegiatan pembelajaran; dan (7) memungkinkan siswa memanfaatkan keterlibatan orang tua dan anggota masyarakat lainnya. (CCE, 1998).

Landasan pemikiran *Project Citizen* menurut Budimansyah (2008: 182) terletak pada satu kerangka yang terdiri atas lima bagian tentang gagasan pendidikan dan politik, yaitu sebagai berikut: **Pertama**, diperlukannya keterlibatan warga negara dalam kehidupan berwarga negara. **Kedua**, Inti dari Pendidikan Kewarganegaraan kaya akan nilai jika para siswa ikut ambil bagian secara aktif dalam kehidupan berwarga negara. **Ketiga**, dengan menggali masalah-masalah yang ada dikomunitas mereka sendiri, maka mereka akan mengetahui prinsip-prinsip demokrasi yang merupakan inti dari pengetahuan kewarganegaraan. **Keempat**, *Project Citizen* dimaksudkan untuk diterapkan terutama oleh para siswa sekolah menengah atau usia-usia remaja pradini

(berusia sekitar 10-15 tahun) yang mulai bergeser dari berpikir kongkrit menuju berpikir abstrak. **Kelima**, *Project Citizen* menganggap siswa sebagai sumber kewarganegaraan yang gagasan dan tenaganya dapat secara nyata dicurahkan pada masalah-masalah kebijakan publik.

Praktek Pelaksanaan Project Citizen

Bagaimana Project Citizen dipraktekkan? Menurut Budimansyah dan Karim Suryadi (2008: 25), strategi instruksional yang digunakan dalam Project Citizen pada dasarnya bertolak dari strategi *inquiry learning*, *discovery learning*, *problem solving learning*, dan *research-oriented learning*, yang dikemas dalam model project “ala” John Dewey. Adapun tahap-tahap pelaksanaannya adalah sebagai berikut, yang dalam kegiatan pelatihan yang dilakukan sepenuhnya mengikuti pada tahapan pelaksanaan tersebut:

- a. Mengidentifikasi masalah kebijakan publik dalam masyarakat. Dalam tahap ini terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan guru bersama siswa, yaitu: mendiskusikan tujuan, mencari tahu masalah apa saja yang siswa ketahui tentang masalah-masalah yang ada di masyarakat, dan memberi tugas pekerjaan rumah tentang masalah-masalah yang ada di lingkungan masyarakat yang mereka anggap penting sesuai dengan kemampuan siswa. Dalam mengerjakan pekerjaan rumah tersebut siswa diarahkan untuk mencari informasi tentang masalah yang akan dikaji dengan cara mewawancarai orang tua atau keluarga, teman, tetangga, dan orang lain yang dianggap menguasai masalah yang dikaji, menggali informasi dari sumber-sumber informasi cetak seperti majalah, koran dan tabloid maupun dari media elektronik dan digital seperti radio, TV dan internet. Semua informasi yang diperoleh harus dicatat untuk didiskusikan di kelas.
- b. Memilih suatu masalah untuk dikaji oleh kelas. Sebelum memilih masalah yang akan dikaji hendaknya para siswa mengkaji terlebih dahulu pengetahuan yang telah mereka miliki tentang masalah yang ada di masyarakat untuk diajukan sebagai usulan masalah (draft masalah). Setelah terhimpun, masalah tersebut kemudian didiskusikan untuk kemudian ditetapkan sebagai masalah yang akan ditindadipelajari oleh kelas. Setelah itu barulah masalah didalami oleh siswa dengan dengan mengumpulkan informasi.
- c. Mengumpulkan informasi yang terkait dengan masalah. Kegiatan pengumpulan informasi dapat dilakukan seperti pada kegiatan pada tahap dua, dengan memperhatikan hal-hal berikut, yaitu melakukan identifikasi sumber-sumber informasi (terakit kesahihannya). Jika dinilai tidak sah, dapat dilakukan peninjauan ulang informasi yang dipilih dan mengganti dengan sumber informasi lain yang lebih sah. Tentu saja penambahan informasi melalui kegiatan pengumpulan informasi perlu terus dilakukan, agar dapat dipastikan bahwa informasi yang diperoleh lengkap dan mendalam.
- d. Mengembangkan portofolio kelas. Pada tahap ini siswa diarahkan untuk membuat portofolio kelas berdasarkan informasi yang telah dihimpun. Terkait hal itu kelas perlu dibagi dalam kelompok-kelompok dan setiap kelompok akan bertanggung jawab untuk membuat satu bagian portofolio yaitu apakah menjelaskan masalah, mengkaji kebijakan alternatif, mengusulkan kebijakan alternatif, atau mengembangkan rencana kerja. Selanjutnya guru akan mengulas tugas pembuatan portofolio. Guru akan menjelaskan spesifikasi portofolio dan bahwa siswa akan menyajikan portofolio (*show case*) di hadapan dewan juri. Dalam menyelenggarakan gelar kasus (*show case*) guru perlu mengalokasikan waktu yang cukup agar audiens dapat memberi tanggapan atas *show case* (audiens dapat pula melibatkan orang tua murid atau komite sekolah atau pihak lain yang relevan agar lebih meriah), dan diakhiri dengan pengumuman dewan juri mengenai pelaksanaan kegiatan secara umum dan penilaian mengenai porto folio yang telah dibuat. Kegiatan penyajian portofolio (*show case*) mengingat membutuhkan cukup banyak waktu, dapat dilaksanakan setelah kelas (di luar jam belajar).

- e. Melakukan refleksi pengalaman belajar. Dalam kegiatan refleksi siswa diajak melakukan evaluasi tentang apa dan bagaimana mereka belajar. Tujuan refleksi adalah untuk belajar menghindari kesalahan di masa yang akan datang dan meningkatkan kinerja siswa.

Praktek pelaksanaan *Project Citizen* dalam kegiatan pelatihan yang diselenggarakan dalam kegiatan abdimas ini, sepenuhnya mengikuti tahapan tersebut di atas. Sebagaimana disebutkan, peserta pertama-tama dibagi dalam kelompok dan tiap kelompok diminta untuk mengidentifikasi masalah yang ada dimasyarakat untuk diusulkan sebagai isu yang dialami. Hanya saja mengingat waktu yang tersedia terbatas (hanya 4 jam untuk keseluruhan waktu mempraktekkan pelaksanaan *Project Citizen*), eksplorasi yang dilakukan dalam proses identifikasi sangat terbatas (sebatas *googling* informasi dari internet). Hal yang mendukung mengingat peserta adalah para guru yang sudah terbiasa dengan kegiatan tersebut, kemampuan mengeksplorasi relatif sudah baik begitu pula dengan penguasaan terhadap isu, sehingga keterbatasan waktu tidak terlalu menjadi kendala meski tidak dapat berlangsung maksimal.

Tahap berikutnya adalah kegiatan diskusi untuk menetapkan masalah terpilih yang dilakukan dengan meminta tiap kelompok mempresentasikan hasil identifikasi. Juri kemudian memberi masukan atas hasil presentasi dan pada tahap berikutnya *floor* menetapkan satu isu untuk dijadikan sebagai isu yang dialami (dilakukan melalui *voting*). Setelah isu ditetapkan kemudian kelompok diarahkan untuk mengerjakan portofolio kelas dengan membagi tugas tiap-tiap kelompok. Kelompok kemudian diminta untuk menyelesaikan (*draft*) portofolio sesuai dengan tugas yang diberikan. Eksplorasi yang dilakukan pada tahap ini juga terbatas seperti sebelumnya, yaitu sebatas *googling* informasi melalui internet karena kondisi tidak memungkinkan. Keterbatasan lainnya karena kegiatan dilakukan secara daring, mengingat kondisi pandemi yang belum memungkinkan untuk berkumpul. Setelah selesai setiap kelompok kembali mempresentasikan hasilnya hingga kegiatan berakhir seperti tahapan yang telah dijelaskan di atas (hingga tahap refleksi).

Berdasarkan praktek melaksanakan *Project Citizen* tersebut, para guru PPKn yang menjadi peserta umumnya merespon positif kegiatan meskipun merasakan bahwa waktu untuk praktek masih dirasa kurang sehingga umumnya menyatakan belum siap untuk melaksanakan di sekolah masing-masing. Terkait hal itu sebagai solusi diputuskan untuk memberikan bimbingan berdasarkan permintaan setelah kegiatan pelatihan berakhir bagi para guru yang berminat, dengan tujuan agar *Project Citizen* dapat benar-benar dilaksanakan oleh para guru dengan baik. Hal lain yang juga banyak dikeluhkan para guru terkait dengan kerumitan metode (melalui beberapa tahap), selain persoalan keterbatasan SDM dalam mempraktekan karena perlu melibatkan orang dewasa selain guru (tidak cukup hanya dengan peran guru) dan alokasi waktu yang relatif panjang. Beberapa keluhan tersebut senada dengan kritik Fachrudin (2010) yang menjelaskan beberapa kelemahan *Project Citizen*, yaitu bahwa kegiatan perlu waktu yang cukup panjang (idealnya 4-6 minggu), membutuhkan biaya, dan tentu saja membutuhkan kesiapan guru yang sangat baik (terutama penguasaan tentang tujuan dan teknik pelaksanaan).

Selain persoalan teknis tersebut, pada aspek substantif penulis menilai ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya, terutama mengingat bahwa *Project Citizen* sebagai model pembelajaran berasal dari luar Indonesia yang boleh jadi membawa nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Indonesia. Sebagaimana diketahui, *Project Citizen* merupakan model pembelajaran yang pertama kali di gunakan di California (USA) pada tahun 1992, yang kemudian dikembangkan menjadi program nasional oleh Center for Civic Education (CCE) dan Konferensi Nasional Badan pembuat Undang-undang Negara di Amerika pada tahun 1995.

Terkait nilai (*value*), salah satunya adalah pada kecenderungan untuk menjadikan *voting* sebagai satu-satunya cara mengambil keputusan, sementara bangsa Indonesia sangat mendahulukan proses musyawarah. Begitu pula dengan kecenderungan lebih menekankan pendekatan dan kepentingan individual sebagai spirit dalam pengambilan kebijakan dan dalam memahami

permasalahan, sementara bangsa Indonesia adalah bangsa yang cenderung bersifat komunal dan lebih menekankan kepentingan bersama (gotong royong) sebagai upaya menyelesaikan masalah. Kehadiran juri juga sangat khas Amerika dan tidak sesuai dengan realitas sosial Indonesia. Karena hal itu sejumlah penyesuaian perlu dilakukan, misalnya saja mengganti juri dengan aktor yang lebih khas Indonesia seperti ketua adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, RW, RT, Kepala Desa, dan lain-lain.

Skup atau cakupan wilayah dimana masalah hendak diselesaikan juga perlu dibuat menjadi lebih sempit sehingga lebih dekat dengan kehidupan nyata para peserta. Misalnya saja bagaimana mengatasi masalah yang ada di RT, RW, atau Kelurahan dan tidak terlalu abstrak seperti menyelesaikan masalah yang ada di kotanya apalagi masalah ditingkat negara. Dalam konteks masalah pembangunan misalnya, dapat dikaitkan dengan keterlibatan warga dalam seluruh tahapan proses pembangunan mulai dari perencanaan (musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang) hingga pengawasan atau *controlling* terhadap kegiatan pembangunan. Sedangkan untuk siswa SD dan SMP skup permasalahan bahkan bisa dibatasi lebih sempit lagi, yaitu masalah yang ada di sekolah (bagaimana terbiasa membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, toleransi, tidak diskriminatif, dll. Penyesuaian-penyesuaian tersebut akan lebih mendekatkan peserta pada kondisi real kehidupan sehari-hari mereka, sehingga akan lebih mudah dalam pelaksanaannya.

Mengenai prosedur dan pentahapan yang rumit, penulis mengusulkan agar pelaksanaan *Project Citizen* tidak terlalu terpaku pada proses dan tahapan-tahapan (prosedur) pelaksanaan sebagaimana ditetapkan, akan tetapi lebih berorientasi pada aspek substansif kegiatan (perlunya kepekaan terhadap masalah yang ada di sekitar dan mengetahui bagaimana prosedur serta proses menyelesaikannya). Modifikasi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut perlu diberi ruang yang cukup luas terutama mengingat kondisi situasional yang ada tidak selalu ideal seperti yang diharapkan. Dengan cara ini kegiatan *project learning* mata pelajaran PPKn melalui *Project Citizen* diharapkan dapat dilaksanakan di lebih banyak tempat dan lebih banyak sekolah.

Hal lain, model *Project Citizen* yang sebenarnya bersifat generik dan universal dengan pengertian dapat digunakan lintas satuan kegiatan (SK), lintas kompetensi dasar (KD) bahkan lintas mata pelajaran (<http://dahli-ahmad.blogspot.com>). Karena hal itu modifikasi dapat dilakukan dengan berbagai bentuk yang lebih luwes, yaitu sesuai dengan kebutuhan sekolah, guru, dan terutama siswa dan tentu saja sesuai dengan tuntutan capaian pembelajaran mata pelajaran yang ada (tidak selalu PPKn).

Informasi lain mengenai kegiatan abdimas yang dilakukan, selain *assessment* kepada para guru juga dilakukan *assessment* ditingkat siswa dengan mengisi kuesioner yang dibagikan melalui *google form* kepada sejumlah pelajar SMP di Kota Depok. Tujuannya untuk mendapat informasi mengenai penilaian (persepsi) dan harapan siswa mengenai pengajaran PPKn yang selanjutnya disampaikan kepada para guru PPKn melalui materi pelatihan. Adapun hasil *assessment* ditingkat siswa secara umum memperkuat asumsi yang dibangun pelaksana kegiatan pengabdian ini sebagaimana dijelaskan pada awal tulisan, yaitu bahwa siswa menginginkan agar mata pelajaran PPKn disampaikan dengan lebih atraktif, yaitu disampaikan dengan memperhatikan *interest* siswa (terutama dalam pemilihan isu), kondisi psikologi (tumbuh kembang) siswa serta karakter khas siswa yang umumnya merupakan generasi Z (sejak lahir sudah terpapar gadget), yaitu dengan menggunakan teknologi digital yang lebih kekinian (canva, quizzes, dll).

Adapun materi yang diberikan dalam kegiatan pelatihan yang diselenggarakan secara lengkap adalah sebagai berikut:

- a. *Materi 1: Menenal dan Mempraktekkan Metode Pembelajaran Inovatif dan interaktif untuk Pembelajaran PPKN (Project Citizen)* oleh Asep Dahliyana, S.Pd., M.Pd. (Universitas Pendidikan Indonesia/UPI Bandung)

- b. *Materi 2: Pengajaran PPKn dalam Perspektif Siswa Didik* (hasil studi mengenai penilaian para siswa SMP di Kota Depok mengenai pengajaran mata pelajaran PPKn) oleh Dr Wahidah R. Bulan, M.Si (Kordinator kegiatan pengabdian masyarakat, dosen FISIP UPNVJ; sekaligus Direktur Eksekutif Institut Literasi Nasionalisme atau ILNAS)
- c. *Materi 3: Teknologi Pembelajaran Daring* (tim Kampus Mengajar Angkatan 2 dengan Dosen Pendamping Lapangan Dr. Wahidah R. Bulan, M.Si)
- d. *Materi 4: Praktek pelaksanaan Project Citizen* oleh Asep Dahliyana, S.Pd., M.Pd.

4. KESIMPULAN

Perlu upaya untuk membuat kegiatan pembelajaran PPKn lebih efektif dan atraktif karena berbagai tantangan dan keterbatasan yang dialami para pengajar PPKn. Diantaranya karena rendahnya minat siswa untuk mempelajari PPKn dan secara khusus untuk mendalami sejarah dan budaya bangsa, akibat ketertarikan yang berlebihan pada budaya luar sebagai dampak penggunaan media sosial terlalu intens. Hal lain mengingat PPKn merupakan mata pelajaran pendidikan karakter yang bersifat multidimensioanal dan mensyaratkan kemampuan tertentu dalam pelaksanaannya dan yang tidak selalu dimiliki para guru PPKn.

Project Learning berdasarkan praktek yang dilaksanakan di banyak tempat oleh berbagai pihak (di SD, SLTP, SLTA, bahkan universitas), terbukti efektif meningkatkan capaian pembelajaran siswa dan mahasiswa yang mengikuti mata pelajaran PPKn maupun Kewarganegaraan sebagaimana diharapkan. Karena hal itu *Project Learning* dinilai dapat dijadikan salah satu alternatif bentuk proyek pembelajaran yang dapat digunakan untuk menjadikan kegiatan pembelajaran PPKn menjadi lebih efektif dan atraktif.

Berdasarkan praktek yang dilaksanakan penulis melalui kegiatan Pelatihan Guru-guru PPKn di Kota Depok pada 2021 lalu, terdapat beberapa catatan perbaikan baik terkait aspek teknis maupun substantif yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya. Terkait aspek teknis, pentahapan yang terlalu panjang, cakupan wilayah dan masalah yang terlalu luas serta pelibatan orang yang cukup banyak, perlu disesuaikan dengan ketersediaan jumlah SDM yang ada di sekolah dimana kegiatan hendak dilaksanakan. Penyesuaian tersebut selain itu dapat memperpendek waktu yang dibutuhkan, selain menghemat biaya yang harus dikeluarkan. Untuk aspek substantif, penyesuaian dimaksud terkait dengan nilai-nilai yang hendak dikembangkan melalui *Project Citizen*, mengingat kegiatan tersebut berasal dari luar Indonesia (Amerika). Misalnya saja terkait dengan kecenderungan untuk menjadikan *voting* sebagai satu-satunya cara mengambil keputusan dan mengabaikan musyawarah. Pengabaian aspek struktur khas Indonesia juga perlu diperhatikan, misalnya saja terkait dengan kehadiran juri yang sangat khas Amerika dapat digantikan dengan peran ketua adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, RT, RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan lain-lain. Pemilihan isu pembangunan yang lebih khas Indonesia, merupakan aspek lain yang perlu disesuaikan; selain disesuaikan dengan kebutuhan sekolah, guru, dan terutama siswa dan tentu saja disesuaikan dengan tuntutan capaian pembelajaran.

REFERENSI

- Branson, M.S. (1998). *The Role of Civic Education*. Calabasas: Center For Civic Education (CCE).
- Budimansyah, D. (2002). *Model Pembelajaran dan Penilaian Berbasis Portofolio*. Bandung: PT Genesindo.
- Budimansyah, D. (2009). *Project Citizen*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia
- Dahliyana, Asep., dan Suabuana, Cik. (2019). *Project Citizen: Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membina Nasionalisme*. *Sosietas Jurnal Pendidikan Sosiologi*. Vol. 9 (2), 708-718.

- Galih, Khairunnisa. (2013). Demam Korean Wave (K-WAVE) di Kalangan Remaja. (Tesis, Universitas Jenderal Soedirman, 2013).
<http://dahli-ahmad.blogspot.com>
<http://rochman-goodcitizen.blogspot.com/2012/06/jurnal-project-citizen.html>
<https://hits.suara.com/read/2021/03/24/133829/miris-bocah-tak-hafal-lagu-indonesia-roya-publik-lagu-tiktok-pasti-hafal?page=all>
<https://tekno.tempo.co/read/483101/mengapa-internet-bikin-kecanduan>
<https://tekno.tempo.co/read/491864/4-alasan-remaja-gemar-media-sosial/full&view=ok>
<https://www.civiced.org/textbooks/project-citizen-level-2>
<https://www.redaksi24.com/duh-banyak-siswa-smkn-di-kabupaten-tangerang-tak-hafal-lagu-kebangsaan/>
- Haryati, Titik., dan Rochman, Noor. (2012). Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Praktik Belajar Kewarganegaraan (Project Citizen). (Penelitian Tindakan Kelas di SMP Negeri 3 Semarang). Jurnal Ilmiah Civis. Vol 2(2).
- Kusumaningsari, Bella Citra. (2017). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Minat Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di SMA Negeri 2 Kota Batu. (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2017).
- Maksum, Hafidz. (2011). Model Project Citizen Untuk Meningkatkan Kecakapan Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Mengembangkan Sikap Nasionalisme. Jurnal Serambi Ilmu, Vol 12(2).
- Muttaqin, Tatang, dkk. (2006). Membangun Nasionalisme Baru, Bingkai Kebangsaan Indonesia Kontemporer. Jakarta: Direktorat Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Ristina. (2009). Pengaruh Project Citizent (Pembelajaran Berbasis Fortofolio) Dalam PKN Terhadap Pengetahuan Warga Negara (Civic Knowledge). (Tesis, Magister Pada Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, 2009)
- Suabuana, C. (2010). Pengembangan Pendidikan Nilai Bela Negara dalam Pendidikan Kewarganegaraan pada Perguruan Tinggi Melalui Model Pembelajaran Project Citizen. (Disertasi, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia, 2010).
- Yosaphat Haris Nusarastraya, dkk. (2013). Pengembangan Berpikir Kritis dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Menggunakan Project Citizen. Jurnal Cakrawala Pendidikan. Th. XXXII (3), 444-449.
- Prasanti, Rahayu Putri., dan Dewi, Ade Irma Nurmala. (2020). Dampak Drama Korea (Korean Wave) terhadap Pendidikan Remaja. Jurnal Pendidikan. Vol. 11 (2).